

KSSK Memperkuat Kebijakan Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Meningkatnya Tekanan Global

Siaran Pers
Nomor: 4/KSSK/Pers/2018

Jakarta, 1 November 2018 – Pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, bertempat di Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama triwulan III 2018 serta mempertimbangkan perkembangan data perekonomian hingga 19 Oktober 2018, KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan triwulan III 2018 secara keseluruhan relatif terjaga.

KSSK memandang dinamika fundamental perekonomian masih berada pada kondisi yang terkendali. Kondisi ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjaga, tingkat inflasi yang stabil dan berada pada level yang rendah. Selain itu, cadangan devisa berada pada level yang memadai, volatilitas nilai tukar yang terkendali, serta defisit APBN dan keseimbangan primer yang jauh lebih baik dari periode sebelumnya. Hal yang sama ditunjukkan oleh indikator sistem keuangan sebagaimana tercermin dari kinerja perbankan antara lain meningkatnya fungsi intermediasi, risiko kredit yang terkendali, serta kapasitas permodalan yang memadai.

KSSK menilai potensi risiko utama yang patut dicermati masih berasal dari arah kebijakan pemerintah AS dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonominya yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia, khususnya mitra dagang utama AS (antara lain perang dagang dan proteksionisme). Sebagai akibatnya, terjadi perlambatan dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perekonomian domestik. Sementara itu, dari dalam negeri, potensi risiko masih berasal dari defisit transaksi berjalan yang terus melebar, nilai tukar yang terus tertekan, serta ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu. KSSK terus melakukan pemantauan dan mitigasi berkelanjutan atas dampak dari berbagai potensi risiko tersebut terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

Mitigasi tersebut diantaranya, di bidang moneter, BI telah dan akan terus memperkuat bauran kebijakan yang konsisten untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI sejak Mei 2018 telah menaikkan suku bunga acuan (BI-7DRRR) sebesar 150 bps hingga menjadi 5,75 persen. BI juga terus menempuh strategi operasi moneter yang diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar Rupiah maupun pasar valas. Pada 1 November 2018 mendatang, BI akan memberlakukan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) dalam rangka mempercepat

pendalaman pasar valas serta memberikan alternatif instrumen lindung nilai bagi bank dan korporasi.

Mitigasi dalam skala internasional juga telah dilakukan BI dengan memperkuat jaring pengaman keuangan internasional bekerjasama dengan otoritas dari beberapa negara. Di sela-sela rangkaian IMF-WB Group *Annual Meetings* 2018 di Bali, pada 11 Oktober 2018, BI dan Monetary Authority of Singapore melakukan kesepakatan awal kerja sama keuangan dalam bentuk *bilateral swap and repo arrangements* senilai ekuivalen USD10 miliar. Selanjutnya, pada 14 Oktober 2018, BI dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan), yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang, telah menandatangani amandemen perjanjian kerja sama *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) senilai USD22,76 miliar.

Di bidang fiskal, Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan kinerja APBN baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 69,26 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 63,53 persen. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 68,11 persen, lebih tinggi dari capaian sebesar 64,45 persen pada tahun sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, defisit anggaran tercatat sebesar 1,35 persen terhadap PDB, lebih baik dari defisit anggaran sebesar 2,00 persen pada tahun sebelumnya, didukung dengan keseimbangan primer yang jauh lebih baik. Memerhatikan kinerja anggaran tersebut serta perkembangan asumsi makro terkini, *outlook* defisit anggaran pada akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai 1,83 persen terhadap PDB, lebih rendah daripada target APBN 2018 sebesar 2,19 persen. Di tengah tekanan yang terjadi pada sistem keuangan, Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar dengan mendorong kinerja neraca perdagangan, antara lain melalui pengendalian kebutuhan impor proyek infrastruktur, implementasi biodiesel B-20, dan perluasan cakupan produk yang dikenakan PPh Impor. Pemerintah juga terus melakukan kebijakan peningkatan daya saing dan promosi ekspor untuk memperbaiki masalah struktural neraca perdagangan.

Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau dinamika eksternal yang dapat memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan dalam negeri. Sejumlah indikator intermediasi keuangan mencatat perkembangan positif, antara lain pertumbuhan kredit perbankan yang terus meningkat (12,69 persen *yoy*) serta penghimpunan dana di pasar modal yang mencapai Rp143,6 triliun (per 19 Oktober 2018 *ytd*). Sementara itu, pada triwulan III 2018, volatilitas di pasar modal domestik masih berlanjut seiring masih tingginya tekanan dari pasar global. Namun, tekanan jual investor nonresiden terpantau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di tengah volatilitas pasar tersebut, profil risiko sektor jasa keuangan terpantau dalam kondisi terkendali. Permodalan lembaga jasa keuangan berada di level memadai untuk mengantisipasi peningkatan risiko sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan per triwulan III 2018 berada pada level 23,03 persen, sedangkan *Risk-Based Capital* (RBC) untuk asuransi umum dan jiwa masing-masing sebesar 315 persen dan 430 persen. Kualitas aset lembaga jasa keuangan masih terjaga, dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* perbankan dan *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 2,66

persen dan 3,17 persen. Meski mengalami peningkatan risiko pasar, lembaga jasa keuangan relatif dapat melakukan mitigasi secara efektif, tercermin antara lain dari nilai investasi asuransi dan dana pensiun yang cenderung stabil. Dana kelolaan industri pengelolaan investasi per 19 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp729,6 triliun, meningkat 7,23 persen dibandingkan akhir 2017.

Secara kelembagaan, OJK senantiasa berupaya memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang dengan terkait risiko pasar dan risiko likuiditas. Selain itu, OJK juga melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkuat ketahanan pasar domestik. Pada triwulan III 2018 OJK telah mengeluarkan paket kebijakan di sektor jasa keuangan untuk mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. OJK memandang masih terdapat ruang yang cukup dalam koridor kehati-hatian untuk mengimplementasikan beberapa kebijakan, dengan tetap menjaga stabilitas industri jasa keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya terkait insentif untuk industri yang berorientasi ekspor dan penghasil devisa, pembiayaan sektor perumahan, dan pengembangan instrumen pembiayaan di pasar modal.

Di bidang penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memantau tren kenaikan suku bunga simpanan perbankan yang masih berlanjut merespon kenaikan suku bunga acuan. Sejak kebijakan moneter mulai mengetat di bulan April 2018, rata-rata suku bunga deposito Rupiah pada 62 bank benchmark telah meningkat sebesar 42 bps (menjadi 5,90%). Sementara itu, rata-rata suku bunga valas dari 19 bank benchmark meningkat sebesar 33 bps (menjadi 1,10%). Penyesuaian suku bunga simpanan terhadap kenaikan suku bunga acuan diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa saat kedepan. Sesuai dengan perkembangan terkini pada tanggal 29 Oktober 2018, LPS kembali menaikkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 bps menjadi 6,75% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 9,25% untuk BPR. Sedangkan untuk tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan tetap sebesar 2,00%.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS, KSSK sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam mengantisipasi dan memitigasi perkembangan dan risiko yang akan dihadapi guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Januari 2019.

Untuk informasi lebih lanjut:

sekretariatkssk@kemenkeu.go.id